BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Protokol Kyoto
Edisi : 27/ September/2007
Hari : Kamis
Halaman : 6

Al Gore Desak Bush Tandatangani Protokol Kyoto



[NEW YORK] Presiden Amerika Serikat (AS), George W Bush didesak untuk mendukung upaya-upaya dunia mengatasi dampak perubahan iklim seperti yan ditunjukkan pendahulunya Ronald Reagen yang mendukung penuh upaya perlindungan terhadap lapisan ozon.

Desakan itu dilontarkan mantan, Wakil Presiden AS, Al Gore, di New York, Rabu (26/9) waktu setempat atau Kamis (27/9) WIB. "Saya sudah meminta secara langsung ke Presiden Bush untuk menunjukkan sikap kepemimpinannya menghadapi perubahan iklim. Saya memintanya meniru Presiden Reagen dan mau mendengar saran dari para penasehatnya untuk segera mereduksi emisi gas-gas rumah kaca khususnya karbondioksida (CO2)," ujar Al Gore.

Seperti diketahui, sampai saat ini, hanya dua negara maju, yakni Amerika Serikat dan Australia yang belum mau menandatangani Protokol Kyoto yang intinya meminta kepada setiap negara-negara anggotanya (189 negara) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka. Saat Presiden Bill Clinton berkuasa, sudah ada tanda-tanda AS bakal mendukung upaya dunia menghadapi perubahan iklim, tetapi kebijakan Clinton ini tidak disetujui Kongres.

Sementara selama dua tahun periode pemerintahnya, Bush secara tegas tidak mau mengikuti Protokol Kyoto, karena beralasan jika AS menurunkan emisi gas rumah kacanya, ekonomi mereka akan terancam oleh pertumbuhan India dan Tiongkok.

"Presiden Reagen itu kan sama dengan Bush, yakni dari Partai Republik. Jadi kalau Reagen ikut tanda tangan Protokol Montreal untuk mengurangi gas hydrochlorofluorocarbons (HCFC) yang merusak ozon, harusnya Bush juga ikut tandatangan Protokol Kyoto," tambah Al Gore seperti dilansir *Reuters*.

Desakan terhadap AS untuk mengikuti Protokol Kyoto tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Uni Eropa mendesak AS dan beberapa negara penghasil emisi besar untuk tunduk terhadap perjanjian Kyoto yang akan habis masa berlakunya tahun 2012. Pertemuan soal negosiasi emisi ini akan dilanjutkan dalam konferensi perubahan iklim di Bali 3-14 Desember 2007.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Adaptasi

Sementara itu, ahli perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung, Armi Susandi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (26/9), mengatakan, sebagai negara yang sangat terbatas sumberdayanya, Indonesia harus melakukan upaya adaptasi yang sungguh-sungguh untuk menghadapi perubahan iklim

"Realitanya, Indonesia hanya mampu melakukan adaptasi kalau mitigasi saya kira terlalu mahal dan kita belum mampu untuk itu. Mampukah kita mengganti bahan bakar beserta kendaraannya dengan menggunakan gas? Perlu biaya yang sangat besar," katanya.

Namun, dia meminta agar pemerintah setahap demi setahap memikirkan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan yang tidak menghasilkan emisi karbondioksida. Sumber energi itu, antara lain panas bumi, mikrohidro, energi surya, biomassa, dan angin. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup